



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Dinas
Perdagangan dan Perindustrian dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Dinas Perdagangan dan Perindustrian** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

-

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2024** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Perdagangan dan Perindustrian**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **86.65** dengan predikat “**A**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Memuaskan**”, yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	29.25	29.75	99.17%
b. Pengukuran Kinerja	30	30	26.4	88.00%
c. Pelaporan Kinerja	15	9.1	9.5	63.33%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19	21	84.00%
Nilai Hasil Evaluasi	100	87.35	86.65	
Predikat SAKIP		A	A	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Tahun 2025 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

1.b1

1. Perjanjian kinerja belum diberi tanggal

2. DPA SKPD untuk diganti yang sudah tanda tangan dan dicap

3. Rencana aksi belum ditandatangan kepala OPD dan dicap

1.b3

Masih ada sasaran kegiatan yang belum bermakna aktif atau tindakan, misal sasaran indikator **Kebutuhan Sarana dan Prasarana Terpenuhi** yang seharusnya **Memenuhi Kebutuhan Sarana dan Prasarana**. Contoh lain; **Barang Milik Daerah Tertib Administrasi**, dapat diganti **Menertibkan administrasi barang milik daerah**.

1.b6

Penjelasan perhitungan/formulasi persentase penambahan IKM untuk di cek kembali

1.b7

Penjelasan perhitungan/formulasi persentase penambahan IKM untuk di cek kembali

1.b9

Untuk diberikan tanda pada sasaran yang ada crosscutting antar bidang atau perangkat dinas lainnya

1.b10

1. Untuk diselaraskan cascading dan perkin di Bidang Industri

2. Terdapat perbedaan **target** antara di IKU dengan renstra

dengan

1.b11

Untuk diberi tanggal

1.c3

Belum dimunculkan IKU yang lain atau sub kegiatan lainn pada laporan triwulan

1.c5

Penyesuaian target harus diselaraskan dengan renstra 2024-2026

1.c6

Untuk ditampilkan tabel 4.1 direnstra bahwa target ada penyesuaian

2.) Pengukuran Kinerja

2.a1

Data dukung yang dilampirkan kurang tepat seharusnya melampirkan "Bagian Pengukuran Kinerja" sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.

2.b2

Data dukung yang dilampirkan harus sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.

2.b3

Data dukung yang dilampirkan harus sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.

2.b7

Lampirkan Rapor Kinerja Triwulan Tahun 2025 dan Tahunan Tahun 2024 sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.

2.c6

Data dukung yang dilampirkan belum sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.

2.c7

Data dukung yang dilampirkan belum sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.

3.) Pelaporan Kinerja

3.a2

lembar pengesahan LKIP

3.a4

LKIP diupload setelah 1 Maret

3.c3

Bukan pembahasan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024

3.c5

bukan pembahasan LKIP 2024 , melainkan evaluasi kinerja TW 1 dan 2

3.c6

Bukan rekomendasi dari LKIP

3.c7

belum aaada keterangan atau narasi penjelasan pemberian penghargaan

4.) Evaluasi Internal

-

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

1.b1

untuk dilengkapi

1.b3

untuk disesuaikan

1.b6

untuk disesuaikan

1.b7

untuk disesuaikan

1.b9

untuk diberi tanda crosscutting nya

1.b10

1. Untuk diselaraskan cascading dan perkin di Bidang Industri

2. Terdapat perbedaan target antara di IKU dengan renstra

dengan

1.b11

untuk disesuaikan

1.c3

untuk disesuaikan

1.c5

untuk disesuaikan

1.c6

untuk disesuaikan

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

2.a1

-

2.b2

Nomenklatur tabel harus sesuai standar bukti dukung dan target agar lebih dirasionalkan

2.b3

target agar lebih dirasionalkan

2.b7

-

2.c6

Terdapat sisa anggaran tetapi capaian masih dibawah 100%

2.c7

-

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

3.a2

lampirkan lembar pengesahan LKIP yang sudah diparaf oleh jabatan struktural

3.a4

untuk tahun berikutnya, LKIP agar diupload sebelum 1 maret

3.c3

agar eviden disesuaikan dengan melihat standar bukti dukung

3.c5

agar melampirkan dokumentasi dan notulensi rapat evaluasi pembahasan LKIP dan kinerja tahun 2024

3.c6

-

3.c7

agar dilengkapi dengan narasi dan penjelasan terkait penghargaan

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

-

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Dinas Perdagangan dan Perindustrian. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka